Radar Bali

Gaji Dewan Capai Rp 100 Juta

Di Badung Mobil Dinas juga Bakal Ganti Baru

MANGUPURA - Duh, enaknya jadi wakil rakyat di kabupaten terkaya di Bali ini. Tak hanya total penghasilan bulanan, mobil dinas anggota DPRD Badung juga bakal diganti.

Mobil dinas Toyota Kijang Innova yang menjadi tunggangan wakil rakyat ini akan ditarik dan digantikan dengan tunjangan uang transportasi ■

▸ Baca **Gaji Dewan...** Hal 31

Penghasilan Wow Wakil Rakyat

Badung

- Tunjangan melejit karena sesuai PP 18 tahun 2017 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah ditindaklanjuti dengan pembentuk Peraturan Daerah (Perda) Badung, di luar gaji pokok bulanan, dewan juga mendapat tunjangan perumahan, serta tunjangan komunikasi
- Di Badung penghasilan sebelumnya mencapai Rp 98 juta per bulan, dengan ditambah tunjangan, seperti tunjangan transportasi Rp 32 juta sebulan, total mencapai Rp 130 jutaan bahkan bisa lebih

Tabanan

- Di Tabanan anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Tabanan naik sebesar Rp 7,98 miliar dari sebelumnya 13,26 miliar, jadi Rp 21,24 miliar. Tambahan penghasilan ditaksir tambah Rp 39,9 juta
- Penghasilan total rata-rata anggota DPRD Tabanan setiap bulannya mencapai Rp 67 juta, ditambah uang saku perjalanan dinas, yang per bulannya Antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta per orang, sekitar Rp 87-92 jutaan

GRAFIS: GT DEWANTARA/RB

Edisi : Kamis, 17 Agustus 2017

Hal : 21

Radar Bali

Tabanan Tambah

Rp 39,9 Juta Per Anggota

■ GAJI DEWAN...

Sambungan dari hal 21

Bahkan tunjangan khusus transportasi ini pun cukup fantastis, mencapai Rp 32 juta.

Selain tunjangan transportasi yang tinggi, sesuai PP 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah ditindaklanjuti dengan pembentuk Peraturan Daerah (Perda) Badung. Di luar gaji pokok bulanan, Dewan Badung juga mendapat tunjangan perumahan, serta tunjangan komunikasi.

Dari keterangan yang diperoleh koran ini menyebutkan bahwa penghasilan anggota dewan per bulan bakal tembus di angka Rp100 juta per bulan. "Gaji anggota dewan rata-rata Rp 98 juta per bulan. Ini nanti bisa tembus Rp 100 juta," ujar sumber koran ini di lingkungan dewan Badung yang enggan namanya disebutkan, kemarin (15/8).

Kenaikan pendapatan dewan juga ditunjang dengan tunjangan transportasi yang begitu besar. Karena kalangan dewan banyak memilih tunjangan transportasi ketimbang mobil dinas.

Hanya saja penarikan 37 mobdin anggota dewan ini akan menyisakan masalah baru. Karena ada 37 sopir dewan dengan status tenaga kontrak yang nasibnya bakal terancam diberhentikan. "Iya, kalau saya pilih uang ketimbang mobil. Kalau soal sopir, itu *kan* urusan sekretariat," jelas seorang anggota dewan yang menolak namanya dikorankan.

Begitu juga anggota dewan lain berpendapat kalau memang mobdin dewan ditarik bisa saja sopir ini tetap bekerja. Namun, gajinya dibayar sendiri oleh para anggota. "Dewan *kan* pilih uang. Kalau mau pakai sopir *ya* gaji sendiri," jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menyatakan masalah ditarik atau tidaknya mobdin anggota DPRD Badung ini masih tahap pembahasan. Namun, sesuai aturan terbaru yakni PP 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, para wakil rakyat diberikan pilihan untuk menggunakan mobdin atau menggantinya dengan uang transportasi.

"Iya, sekarang *kan* diberi kebebasan, pakai mobil dinas atau pilih uang tunjangan transportasi. Kalau pilih uang, *ya nggak* dapat mobil. Otomatis mobil dinasnya harus ditarik," ujarnya.

Sejauh ini, mobdin para anggota dewan belum ditarik karena

Edisi :

Hal :

Radar Bali

aturannya masih digodok. Kalau aturan sudah turun, maka pihaknya selaku pimpinan akan memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih. Namun, dirinya selaku ketua dewan akan tetap memilih menggunakan mobdin. "Sekarang belum. Aturannya masih dimatangkan di Bagian Hukum. Tapi, saya sebagai simbol lembaga tetap akan pakai mobil dinas, " tegas politisi asal Dalung ini.

Mengenai nasib sopir, Parwata menambahkan para tenaga sopir otomatis tidak terpakai lagi. Hanya saja kalau anggota ingin menggunakan tenaga sopir, maka yang bersangkutan harus memberi gaji sendiri. "Soal sopir tergantung sekretariat. Yang pasti kalau anggota ingin pakai sopir, *ya* dia gaji sendiri," pungkasnya.

Nasib bagus juga dialami wakil rakyat Tabanan. Akhir tahun 2017 ini, mereka bakal mendapat tambahan anggaran besar untuk kenaikan penghasilan. Nilainya pun fantastis. Rata-rata, per orang bisa mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 39,9 juta per bulan.

Kepastian adanya kenaikan sejumlah tunjangan baik tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, tunjangan perumahan, hingga uang saku reses, itu terungkap di sela pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD 2017 yang digelar di aula kantor camat Kediri, Tabanan, kemarin. Anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Tabanan naik sebesar Rp 7,98 miliar dari sebelumnya "hanya" 13,26 miliar. Atau, jadi Rp 21,24 miliar.

Namun, tambahan itu hanya untuk lima bulan atau Agustus sampai Desember. Dengan demikian, tambahan sebesar itu jika dibagi rata bagi 40 anggota DPRD Tabanan, angkanya sebesar Rp 39,9 juta per bulan.

Meski demikian, dalam praktiknya tambahan untuk beragam tunjangan ini berlaku proporsional berdasar kedudukannya, yakni sebagai ketua, wakil ketua, pimpinan alat kelengkapan dewan, dan sebagai anggota dewan. Dengan demikian, penghasilan total rata-rata anggota DPRD Tabanan setiap bulannya mencapai Rp 67 juta, itu belum termasuk tambahan penghasilan dari uang saku perjalanan dinas yang per bulannya antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta per orang.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan IB Wiratmaja mengakui adanya penambahan anggaran yang diminta DPRD Tabanan. Dari sebelumnya DPRD Tabanan meminta ada penambahan Rp 45 miliar, disetujui sekitar Rp 50 miliar. Dari jumlah itu, khusus untuk kenaikan penghasilan anggota DPRD sesuai dengan terbitnya PP 18 Tahun 2017 mencapai Rp 7,981 miliar. "Dananya sekitar Rp 50 miliar," tandas Wiratmaja.

Untuk memenuhi kenaikan belanja ini, ada beberapa penundaan program. Di antaranya penundaan kegiatan di Dinas Kominfo Tabanan Rp 1,495 miliar dan di Dinas PU Rp 1,28 miliar. **(dwi/yor/pit)**

Edisi : Kamis, 17 Agustus 2017
Hal : 31

Radar Bali

Saksi Tak Pernah Lihat Bangunan

Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Anggota DPRD Klungkung

DENPASAR-Sidang kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung, senilai Rp 200 juta dengan terdakwa anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen Adnyana dan dua anaknya I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kadek Endang Astiti, Rabu (16/8) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Mengagendakan pemeriksaan saksi, pada sidang dengan Majelis Hakim pimpinan Ni Made Sukereni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meyer V. Simanjuntak dkk menghadirkan lima saksi. Kelima saksi itu, yakni mantan Perbekel Getakan, Banjarangkan, Klungkung, Dewa Ketut Widana; Perbekel aktif Desa Getakan Tjokorda Putra Parwata; Bendesa Pekraman Getakan Ketut Suana; Pegawai kontrak di Fraksi Partai Gerindra DPRD Klungkung Ni Wayan Maryati, dan Kabag Kesra Kabupaten Klungkung Wayan Winata.

Pada pemeriksaan pertama, JPU menghadirkan tiga saksi sekaligus, yakni mantan perbekel Getakan, perbekel Getakan dan bendesa pekraman Pekraman. Yang menarik, dari ketiga keterangan saksi tidak mengetahui adanya lahan dan bangunan dari Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung. "Kami juga tidak tahu adanya proposal termasuk pencairan dana hibah, "ujar mantan Perbekel Getakan Dewa Ketut Widana.

Bahkan, saat JPU dan penasehat hukum terdakwa menunjukkan adanya tanda tangan saksi pada proposal yang diajukan oleh panitia pembangunan merajan (para terdakwa), saksi mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu tanda tangan itu. Pada saat itu tidak ada proposal yang diajukan, kalau kemudian ada tanda tangan itu kata terdakwa sebagai contoh,"ujar saksi Widana.

Demikian juga saat ditanya latar belakang para terdakwa, Widana mengaku untuk dua terdakwa yang tak lain anak dari anggota Fraksi Partai Gerindra Klungkung Wayan Kicen, yakni I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kadek Endang Astiti, tidak kenal. " Kalau bapaknya kenal sebagai anggota dewan, tapi untuk dua anaknya keseharian dan pekerjaannya apa saya tidak tahu. Saya tahu bahwa mereka adalah warga saya di Anjingan,"paparnya.

Senada dengan Widana, saksi kedua, yakni Perbekel Getakan Tjokorda Putra Parwata. Di depan persidangan, sebagai perbekel aktif, saksi juga menyatakan hal yang sama. Pihaknya tidak tahu menahu kalau ada pengajuan proposal pembangunan pura merajan dari dana hibah APBD Klungkung.

Sedangkan Bendesa Pekraman Getakan, Ketut Suana juga tidak mengetahui adanya pembangunan pura merajan yang dimaksud.

Sementara saksi lain yakni Ni Wayan Maryati mengatakan, dia hanya diminta untuk mengajukan proposal oleh terdakwa Kicen ke bagian Kesra. Selanjutnya setelah proposal diterima staf Budiani, dia tidak tahu seperti apa kelanjutannya. "Tugas saya hanya membantu bapak-bapak di Fraksi Gerindra. Baik mengetik, membawa proposal atau menyiapkan keperluan lain. Tapi khusus ini saya tidak dikasih uang jajan, "aku Maryati.

Terakhir saksi yang juga Kabag Kesra Klungkung Wayan Winata di depan persidangan, hanya membantu SK Penetapan dari OPD terkait yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Klunngkung. "Jadi kami hanya bergantung dari rekomendasi SKPD dan OPD terkait. Setelah itu kami kuatkan SK untuk kemudian bisa diajukan ke bagian keuangan, "jelasnya.

Menurutnya saat pengajuan proposal, para terdakwa awalnya mengajukan sekitar Rp 300 juta, namun yang bisa dicairkan RP 200 juta.

Setelah cair, kata Winata, adanya penyelewengan justru dari hasil Monev yang dilakukan BPK RI pada bulan Maret 2016. "Saat itu kebetulan kami (Kesra) bertugas mendampingi. Baru dari hasil itu, kami laporkan ke atasan yakni asisten, sekda termasuk bupati. Hasilnya kami diminta tindaklanjuti dan turun pada bulan Mei 2016,"paparnya.

Atas keterangan para saksi, para terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya membenarkan. Selanjutnya sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam kasus ini, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. **(pra/dot)**

Edisi : Kamis, 17 Agustus 2017
Hal : 22